

**PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG
BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)**

TESIS

Oleh :

HORMAN SIREGAR
NIM : 2002190092



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG
BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

HORMAN SIREGAR
NIM : 2002190092



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Horman Siregar
NIM : 2002190092
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Juli 2023





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)**

Oleh :

Nama : Horman Siregar
NIM : 2002190092
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Juli 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 304106202

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN: 0327096504

Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M
NIDN. 0331038704

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M., Pd., PA
NIDN: 0320116402




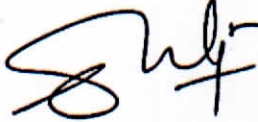

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 3 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Horman Siregar
NIM : 2002190092
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Horman Siregar
NIM : 2002190092
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perdamaian Yang Tercapai Dalam Kepailitan Yang Berasal
Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan-Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 3 Juli 2023



Horman Siregar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena RahmatNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby).

Penulisan Tesis ini dibuat dan disusun sebagai Tugas Akhir Penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang Penulis miliki. Meskipun demikian Penulis berusaha semaksimal mungkin agar penulisan Tesis ini berhasil dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya rekan mahasiswa/mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Bersama ini pula dengan kerendahan hati, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Orang Tua Tercinta yang telah mewariskan motivasi kuat bagi Penulis dan ucapan terima kasih teristimewa kepada Istri tercinta Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H karena telah memberikan dukungan moril serta tidak terlepas dari keinginan Penulis untuk memotivasi Anak-anak tercinta Angel Risha, S.H., Martin Haris Hasudungan dan Ruth Marisha.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing materi tesis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M selaku Dosen Pembimbing teknis penulisan tesis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajari dan membimbing Penulis selama perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia.
8. Seluruh staff Akademik Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu Penulis sejak registrasi masuk perkuliahan sampai dengan menyelesaikan perkuliahan.
9. Semua rekan-rekan Lawyer pada RISMA SITUMORANG & PARTNERS Law Office yang sangat memotivasi dan selalu semangat sekalipun Saya harus mendelegasikan tugas-tugas kantor selama beberapa bulan agar dapat fokus dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis pada Universitas Kristen Indonesia serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 6 Juli 2023.

Penulis,



Horman Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	19
1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	20
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	20
1.4.2. Kerangka Konsep.....	21
1.5. Metode Penelitian.....	24
1.5.1. Jenis Penelitian.....	25
1.5.2. Pendekatan Penelitian.....	25
1.5.3. Objek Penelitian.....	26
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	26
1.5.5. Metode Analisis Data.....	28
1.6. Orisinalitas Penelitian.....	30
1.7. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
2.1. Tinjauan Umum.....	36
2.1.1. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	36
2.1.2. Tinjauan Umum Kepailitan.....	47
2.1.3. Tinjauan Umum Perdamaian.....	52
2.2. Tinjauan Teoritis.....	59
BAB III KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR DAN DEBITOR DALAM KEPAILITAN SETELAH DITOLAKNYA RENCANA PERDAMAIAN DALAM PROSES PKPU.....	70
3.1. Jenis-Jenis Kreditor.....	70
a. Kreditor Separatis.....	71
b. Kreditor Preferen (Istimewa).....	72
c. Kreditor Konkuren.....	75

3.2. Rapat-Rapat Kreditor	77
3.3. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	83
3.4. Putusan Pailit	86
3.5. Proses Perdamaian Dalam Kepailitan	88
3.6. Kedudukan Kreditor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU	93
3.7. Kedudukan Debitor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU	94
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENGESAHKAN PERDAMAIAN DI KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PKPU	97
3.1. Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).....	97
3.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengesahkan Perdamaian Di Kepailitan Yang Berasal Dari PKPU	100
BAB V PENUTUP	106
5.1. Kesimpulan	106
5.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya melarang Debitor mengajukan rencana perdamaian apabila dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 292. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit yang diakibatkan selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal 144 UU Kepailitan & PKPU dinyatakan setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditornya. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini hendak menjawab masalah hukum berkenaan dengan kedudukan hukum Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU. Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus berupa putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Debitor dan Kreditor tetap dapat mencapai perdamaian walaupun Pengadilan Niaga telah menyatakan Debitor dalam keadaan pailit yang berasal dari PKPU. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengesahkan perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam kepailitan yang berasal dari PKPU sebagaimana dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah hasil voting proposal perdamaian debitor pailit yang telah disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. Selain itu Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut.

Kata Kunci : Debitor, Kreditor, Perdamaian.

ABSTRACT

Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) only prohibit the Debtor from submitting a reconciliation plan if declared bankrupt based on Article 285, Article 286 and Article 292. Thus, the decision to declare bankruptcy caused other than the provisions of Article 285, Article 286 and Article 291 of the Bankruptcy Law and PKPU, is still permitted to submit a reconciliation plan in bankruptcy in accordance with the provisions of Article 144 of the Bankruptcy Law and PKPU. Article 144 of the Bankruptcy Law & PKPU states that every bankrupt debtor has the right to offer peace to all of his creditors. That is, the settlement can be offered by the debtor after the debtor is declared bankrupt by the Commercial Court. This research aims to answer legal issues regarding the legal position of debtors and creditors in bankruptcy after the rejection of the peace plan in the PKPU process. To answer the research problem, this study uses a type of normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach in the form of a Surabaya Commercial Court decision which is legal and binding. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that debtors and creditors can still reach peace even though the Commercial Court has declared that the debtor is in a state of bankruptcy originating from PKPU. The legal considerations of the panel of judges in ratifying the reconciliation of PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera in bankruptcy originating from PKPU as stated in Decision No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court is the result of voting for a bankruptcy debtor's settlement proposal that has been approved by the creditor in accordance with the provisions of Article 151 of the Bankruptcy Law and PKPU which is then set forth in a peace agreement. In addition, the Court did not find any reasons for refusing to ratify the settlement in accordance with Article 159 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, the court is obliged to give a decision regarding the ratification of the settlement.

Keywords: Debtors, Creditors, Peace.